

**POLA KOMUNIKASI LKAAM PADANG PARIAMAN DENGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**(Studi Kasus : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Parit Malintang)**

TESIS

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas***



OLEH :

JACKY ALVI YENDI

2220862003

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2025**

ABSTRAK

POLA KOMUNIKASI LKAAM PADANG PARIAMAN DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

**(Studi Kasus : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Parit Malintang)**

Oleh : Jacky Alvi Yendi (2220862003)

**Pembimbing : Prof. Dr. Lucky Zamzami, M.Soc. Sc
dan Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si**

Penelitian ini berfokus pada pola komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dengan studi kasus di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Perda ini dimaksudkan sebagai dasar penguatan kelembagaan nagari sekaligus pelestarian adat Minangkabau dalam tata kelola pemerintahan. Namun, meskipun telah diberlakukan selama enam tahun, pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh proses sosialisasi yang minim, bersifat formalistik, serta kurang melibatkan masyarakat adat secara menyeluruh. Padahal, nagari sebagai unit sosial-budaya memiliki struktur adat yang kuat, di mana peran lembaga seperti LKAAM, KAN, pemerintah nagari, dan para pemangku adat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus, penelitian ini menelusuri bagaimana pola komunikasi terbentuk antar-aktor kunci tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh adat maupun pemerintah nagari, sehingga dapat tergambarkan dinamika komunikasi yang berlangsung, baik dalam ruang formal maupun keseharian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun masih bersifat satu arah, elitis, dan cenderung menempatkan masyarakat sebagai penerima informasi pasif. Akibatnya, Perda belum sepenuhnya dipahami, apalagi diinternalisasi sebagai aturan bersama yang hidup dalam praktik adat sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif Perda dengan realitas penerapannya di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi Perda hanya dapat dicapai melalui pola komunikasi partisipatif, yaitu komunikasi yang melibatkan masyarakat sejak tahap sosialisasi, perumusan strategi, hingga pengambilan keputusan. Dengan pola komunikasi demikian, Perda tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga terintegrasi dalam kehidupan masyarakat adat sebagai subjek utamanya.

Kata Kunci: *Pola Komunikasi, Perda Nagari, Implementasi. LKAAM, KAN, Pemerintah Nagari*

ABSTRACT
**COMMUNICATION PATTERNS BETWEEN LKAAM PADANG
PARIAMAN AND CUSTOMARY COMMUNITIES**

*(A Case Study on the Implementation of West Sumatra Provincial Regulation
No. 7 of 2018 on Nagari in Parit Malintang Nagari)*

By: Jacky Alvi Yendi (2220862003)

**Supervisors: Prof. Dr. Lucky Zamzami, M.Soc.Sc
and Dr. Rahmi Surya Dewi, M.Si**

This study focuses on communication patterns in the implementation of West Sumatra Provincial Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari, with a case study in *Nagari Parit Malintang, Padang Pariaman Regency*. This regulation is intended as a basis for strengthening *nagari* institutions and preserving Minangkabau customs in governance. However, even though it has been in effect for six years, the community's understanding of the substance of the regulation is still limited. This is due to a minimal, formalistic socialization process that does not fully involve the indigenous community. In fact, *nagari* as a socio-cultural unit has a strong customary structure, in which the role of institutions such as *LKAAM*, *KAN*, the *nagari* government, and customary leaders is crucial to the successful implementation of policies. Using a qualitative approach and case study strategy, this study explores how communication patterns are formed between these key actors. Data was collected through field observations and in-depth interviews with traditional leaders and *nagari* government officials, thereby illustrating the dynamics of communication that take place, both in formal settings and in everyday community life. The results of the study show that the communication that has been established is still one-way, elitist, and tends to place the community in the position of passive recipients of information. As a result, the local regulations have not been fully understood, let alone internalized as common rules that are alive in everyday traditional practices.

Keywords: *Communication Patterns, Village Regulations, Implementation, LKAAM, KAN, Village Government*